



RENJA



DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA & STATISTIK
PROVINSI DKI JAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 dapat disusun dengan baik.

Renja merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang disusun dengan memedomani Surat Edaran Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 53/SE/2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2024. Secara substansi, dokumen Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2024 memuat hasil evaluasi Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik tahun lalu (n-2), tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, serta rencana kerja dan pendanaan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

Kami sadari bahwa masih terdapat kekurangan yang membutuhkan perbaikan dan penyempurnaan dalam perencanaan pembangunan, khususnya urusan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Oleh karena itu, rekomendasi yang konstruktif tetap akan menjadi masukan dalam identifikasi permasalahan pembangunan, arah kebijakan pembangunan, program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja, penyesuaian dengan sasaran dan prioritas nasional, dan identifikasi program, kegiatan dan sub kegiatan menurut kewenangan Provinsi dan Kota/Kabupaten di masa yang akan datang.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan dokumen Rancangan Akhir Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi kita semua.

Jakarta, Juli 2023

Plt.Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Sigit Wijatmoko
NIP.197408301993111001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	
Daftar Isi	2
Executive Summary	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK TAHUN LALU.....	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan	33
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik.....	34
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).....	37
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	37
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	38
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	38
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	40
3.3 Program dan Kegiatan.....	42
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	44
BAB V PENUTUP	68

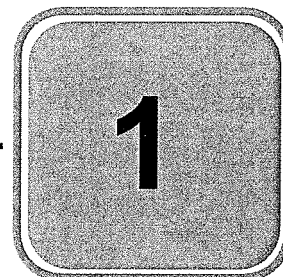
EXECUTIVE SUMMARY

Dalam rangka mewujudkan *open government*, peningkatan ketersediaan dan kualitas layanan komunikasi dan informatika mutlak dibutuhkan melalui perencanaan pembangunan yang terukur. Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusun Renja sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta sebagai organisasi perangkat daerah yang membidangi komunikasi, informatika, statistik, dan persandian tentu diharapkan mampu memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian kepada masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi dapat terlaksana. Dengan upaya pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian yang dilaksanakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik maka diharapkan masyarakat akan lebih partisipatif memanfaatkan komunikasi dan informatika melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), akselerasi transformasi digital dalam rangka terwujudnya reformasi birokrasi di DKI Jakarta.

PENDAHULUAN



Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud & Tujuan, Sistematika Penulisan

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Penyusunannya berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Hal tersebut ditegaskan kembali dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang dalam pasal 15 Ayat (1) mengamatkan bahwa "Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah".

Proses penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta mengacu pada Rancangan Akhir RKPD Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD Tahun 2024. Selain itu juga dengan mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik tahun sebelumnya, dan target kinerja tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2024, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
17. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020;
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
22. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.
23. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
24. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

25. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026
26. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 53/SE/2022 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Tahun Anggaran 2024

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 disusun untuk mewujudkan target kinerja tahun 2024 dengan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki.

Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik ke dalam rencana operasional tahunan;
2. Menyediakan arahan/pedoman bagi aparatur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2024;
3. Menjadi alat ukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan tugas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Sebagaimana telah diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dokumen Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dijabarkan penjelasan ringkas tentang Renja perangkat daerah, keterkaitan antara Renja dengan RKPD dan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah, serta proses penyusunan Renja.

BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2022

Bab ini berisi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun 2023; analisis kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik ; isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta; review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang bersumber dari hasil Rembuk RW, usulan langsung masyarakat.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dijabarkan penelaahan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik , program dan kegiatan.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi uraian penutup yang terdiri atas catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022



Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2022 ditinjau dari capaian program dapat dilihat dalam Tabel 2.1. Terdapat 4 (Empat) program utama yang diampu oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yaitu Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik, Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi. Selain itu terdapat program yang bersifat umum dan digunakan oleh seluruh OPD yaitu program “Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi”.

Tabel 2.1 Realisasi Capaian Program Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	A. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Jumlah cakupan layanan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang menjalankan layanan SPBE	51 Perangkat Daerah	51 Perangkat Daerah	100%	-
2	A. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Jumlah masyarakat yang mengkonsumsi informasi publik dari kanal/saluran informasi	Tingkat capaian penyebaran informasi dari kanal media informasi Provinsi DKI Jakarta	6600000	125016106	100%	-

No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		resmi Pemprov DKI Jakarta					
3	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam proses pengambilan kebijakan	Jumlah Perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam pengambilan kebijakan/ (dibagi) Jumlah seluruh perangkat daerah yang ada x 100%	100%	100%	100%	
4	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase perangkat daerah Provinsi yang telah menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik Pemerintah/ (dibagi) Jumlah seluruh perangkat daerah yang ada x 100%	100	100	100%	
5	B. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Jumlah masyarakat yang mengkonsumsi informasi publik dari kanal/saluran informasi resmi Pemprov DKI Jakarta di tingkat Kabupaten/ Kota	Tingkat capaian penyebaran informasi dari kanal media informasi Provinsi DKI Jakarta	6000000	50001065	100%	
6	B. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Jumlah cakupan layanan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang menjalankan layanan SPBE	51	51	100%	
7	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase perangkat daerah di Kabupaten/ Kota yang telah menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik Pemerintah/ (dibagi) Jumlah seluruh perangkat daerah yang ada x 100%	100	100	100%	

1. Pada Program Pengelolaan Aplikasi Informatika terdapat Indikator kinerja program yaitu Jumlah cakupan layanan SPBE yang memiliki target kinerja pada tahun 2022 sejumlah 51 dengan satuan Perangkat Daerah, pada triwulan ke IV tahun 2022 memiliki realisasi sejumlah 51 perangkat daerah yang artinya Sub Kegiatan Pada Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dapat mendukung Indikator Program dengan tingkat capaiannya senilai 100%.
2. Pada Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik terdapat Indikator kinerja program yaitu Jumlah masyarakat yang mengkonsumsi informasi publik dari kanal/saluran informasi resmi Pemprov DKI Jakarta yang memiliki target kinerja pada tahun 2022 sejumlah 6.600.000 dengan satuan orang, pada triwulan ke IV tahun 2022 memiliki realisasi sejumlah 125.016.106 yang artinya Sub Kegiatan Pada Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik dapat mendukung Indikator Program dengan tingkat capaiannya senilai 100%.
3. Pada Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral terdapat Indikator kinerja program yaitu Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam proses pengambilan kebijakan yang memiliki target kinerja pada tahun 2022 sejumlah 100 dengan satuan Persen, pada triwulan ke IV tahun 2022 memiliki realisasi sejumlah 100% Perangkat daerah menggunakan data statistik yang artinya Sub Kegiatan Pada Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dapat mendukung Indikator Program dengan tingkat capaiannya senilai 100%.
4. Pada Program Persandian Untuk Pengamanan Informasi terdapat 1 Indikator program yaitu Persentase perangkat daerah Provinsi yang telah menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah yang memiliki target kinerja pada tahun 2022 sejumlah 100 dengan satuan Persen, pada triwulan ke IV tahun 2022 memiliki realisasi sejumlah 100% Perangkat Daerah yang menggunakan layanan persandian yang artinya Sub Kegiatan Pada Program Persandian Untuk Pengamanan Informasi dapat mendukung indikator Program dengan tingkat capaiannya senilai 100%.

Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
s.d. Tahun 2022 Provinsi DKI Jakarta

Nama Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)/ Subkegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Strategis Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja (Outcome) Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020*	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021*			Target Program dan Kegiatan (Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022		Keterangan
						Target Rencana Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021	Capaian (100%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Capaian Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)	13
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	2.16.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Nilai kepuasan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	4	4	4	4	100%	4	12	100%	
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	2.16.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pembayaran Gaji atau Tunjangan ASN	100	100	100	100	100%	100	300	100%	
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	2.16.01.1.03.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai kepuasan ketersediaan jasa administrasi keuangan	4	4	4	4	100%	4	12	100%	
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	2.16.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Kepuasan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4	4	4	4	100%	4	12	100%	

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	2.16.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Nilai Kepuasan Penyediaan Bahan/Material	4	4	4	4	4	4	100%	4	12	100%	
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	2.16.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai Kepuasan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	4	4	4	4	4	100%	4	12	100%	
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	2.16.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4	4	4	4	4	4	100%	4	12	100%	
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	2.16.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4	4	4	4	4	4	100%	4	12	100%	
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	2.16.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4	4	4	4	4	4	100%	4	12	100%	
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	2.16.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Kepuasan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4	4	4	4	N/A	4	N/a	4	N/a	N/a	
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	2.16.02.1.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Persentase opini dan aspirasi publik yang dimonitor dan disampaikan kepada pihak terkait	100	100	100	100	100	100	100%	100	300	100%	

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	2.16.02.1.01.03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Persentase agenda prioritas pemerintah daerah yang dikomunikasikan kepada publik dan pihak terkait	100	100	100	100	100	100	100	300	100%
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	2.16.02.1.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah konten komunikasi publik Pemerintah Daerah yang dikemas dan ditayangkan melalui media komunikasi publik	420	420	759	181%	420	420	1599	1599	100%
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	2.16.02.1.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media/kanal komunikasi publik yang dikelola/digunakan oleh Pemprov DKI Jakarta	5	5	5	100%	5	5	15	15	100%
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	2.16.02.1.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Persentase permohonan informasi publik yang diterima dan ditindaklanjuti	100	100	100	100%	100	100	300	300	100%
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	2.16.02.1.01.07	Layanan Hubungan Media	Presentasi fasilitas dan layanan pemerintahan daerah terhadap pers/media	100	100	100	100%	100	100	300	300	100%
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	2.16.02.1.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Laporan fasilitas pemerintahan daerah dalam kegiatan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik	1	1	1	100%	1	1	3	3	100%

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	2.16.02.1.01.11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan Komisi Informasi Provinsi	2	2	2	100%	2	6	100%	
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	2.16.02.1.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Komunitas	Persentase fasilitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Komunitas	100	100	100	100%	100	300	100%	
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	2.16.03.1.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase perangkat daerah/unit dan/atau instansi pemerintah pusat yang terkoneksi dengan jaringan intra pemerintah daerah	100	100	100	100%	100	300	100%	
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	2.16.03.1.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Persentase aplikasi layanan publik dan layanan pemerintahan yang menggunakan Pusat Data Pemerintah Daerah/Nasional	100	100	100	100%	100	300	100%	
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	2.16.03.1.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Persentase layanan Telekomunikasi Intra Pemerintah Daerah	97	97	98,005	101%	97	292,005	100%	

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	2.16. 03.1. 02.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi penggunaan dokumen elektronik dan Informasi Elektronik	1	1	1	1	1	N/A	N/a	N/a
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	2.16. 03.1. 02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase pembangunan dan pengembangan aplikasi yang ditindaklanjuti sesuai dengan pengajuan dan atau kebijakan	100	100	100	100	100	100%	100	100%
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	2.16. 03.1. 02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Persentase layanan perangkat daerah/unit perangkat daerah berbasis elektronik yang terintegrasi melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100	100%	300	100%
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	2.16. 03.1. 02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah jenis fasilitas Pemerintah Daerah dalam pengembangan sumberdaya teknologi informasi dan komunikasi	1	1	1	1	1	100%	3	100%
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	2.20. 02.1. 01.02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah fasilitas pemerintah daerah dalam Peningkatan kapasitas SDM dan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	2	2	2	2	2	100%	6	100%

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	2.20. 02.1. 01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Persentase perangkat daerah/unit perangkat daerah yang berkontribusi dalam pembangunan metadata statistik sektoral	100	100	100	100	100	100	100	300	100%
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	2.20. 02.1. 01.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah fasilitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	2	2	2	2	2	2	2	6	100%
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	2.21. 02.1. 01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi / Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi yang ditetapkan, disosialisasikan dan dilakukan pemantauan/evaluasi	2	2	2	2	2	2	2	6	100%
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	2.21. 02.1. 01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan hasil audit Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1	1	1	1	1	1	1	3	100%

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	2.21.02.1.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase perangkat daerah/unit kerja perangkat daerah yang menggunakan salah satu fasilitas layanan keamanan informasi pemerintah daerah/pusat	100	100	100	100	100	100	100	300	100%	
SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA - JAKPUS	2.16.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai Kepuasan Pelayanan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4	4	4	4	4	4	4	12	100%	
SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA - JAKPUS	2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Kepuasan terhadap Layanan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota/Kab Administrasi	4	4	4	4	4	4	4	12	100%	
SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA - JAKPUS	2.16.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Nilai Kepuasan terhadap Layanan Penyediaan Bahan/ Material pada Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Pusat	4	4	4	4	4	4	4	12	100%	

SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA - JAKPUS	2.16.01.2.06.08	Fasilitas Kurjungan Tamu	Nilai Kepuasan terhadap Layanan Penyediaan Makanan dan Minuman pada Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Pusat	4	4	4	4	4	100%	4	12	100%	
SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA - JAKPUS	2.16.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Pertengkapan Kantor	Nilai Kepuasan terhadap Pelayanan Penyediaan Jasa Peralatan dan Pertengkapan Kantor pada Suku Dinas Komunikasi dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Pusat	4	4	4	4	4	100%	4	12	100%	
SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA - JAKPUS	2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai kepuasan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan di Sudin Kominfoik Kota Administrasi Jakarta Pusat	4	4	4	4	4	100%	4	12	100%	
SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA - JAKPUS	2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah dokumentasi dan publikasi yang dikelola pada lingkup Kota Administrasi Jakarta Pusat	500	500	1509	500	500	302%	500	2509	100%	

SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA - JAKPUS	2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Laporan fasilitasi pelayanan informasi publik	1	1	1	1	100%	1	3	100%	
SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA - JAKPUS	2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase Pengelolaan dan Layanan Local Area Network di tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat	100	100	100	100	100%	100	300	100%	
SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA - JAKPUS	2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disosialisasikan dan dimonitor di Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	4	4	4	4	100%	4	12	100%	
SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA - JAKPUS	2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah fasilitasi Pemerintah Daerah dalam pengembangan sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi di tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat	1	1	1	1	100%	1	3	100%	
SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA - JAKUT	2.16.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai kepuasan pelayanan penatausahaan dan pengujian/verifikasi SKPD	4	4	4	4	N/A	4	N/a	N/a	

SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA - JAKUT	2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	Nilai kepuasan pelayanan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	4	4	4	4	4	4	100%	4	12	100%	
SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA - JAKUT	2.16.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Nilai kepuasan pelayanan penyediaan bahan/material	4	4	4	4	4	4	100%	4	12	100%	
SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA - JAKUT	2.16.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai kepuasan pelayanan fasilitas kunjungan tamu	4	4	4	4	4	4	100%	4	12	100%	
SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA - JAKUT	2.16.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor	Nilai kepuasan pelayanan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	4	4	4	4	4	4	100%	4	12	100%	
SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA - JAKUT	2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai kepuasan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	4	4	4	4	4	4	100%	4	12	100%	
SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA - JAKUT	2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah dokumentasi dan publikasi yang dikelola pada lingkup Kota Administrasi Jakarta Utara	600	600	600	1635	600	600	273%	600	2835	100%	

SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA - JAKUT	2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Laporan fasilitasi pelayanan informasi publik	1	1	1	1	100%	1	3	100%	
SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA - JAKUT	2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase perangkat daerah/unit dan/atau instansi pemerintah pusat yang terkoneksi dengan jaringan intra pemerintah daerah	100	100	100	100	100%	100	300	100%	
SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA - JAKUT	2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang di sosialisasikan dan dimonitor di Pemerintah Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara	4	4	4	4	100%	4	12	100%	
SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA - JAKUT	2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Persentase aplikasi layanan publik dan layanan pemerintahan yang menggunakan pusat data pemerintah daerah/nasional di tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara	100	100	100	100	100%	100	300	100%	

SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA - JAKUT	2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah fasilitas Pemerintah Daerah dalam pengembangan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi di tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara	1	1	1	1	100%	1	3	100%
SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA - JAKBAR	2.16.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai Kepuasan Pelayanan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4	4	4	4	100%	4	12	100%
SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA - JAKBAR	2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	Nilai Kepuasan terhadap Layanan Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Barat	4	4	4	4	100%	4	12	100%
SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA - JAKBAR	2.16.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Nilai Kepuasan terhadap Layanan Penyediaan Bahan/ Material pada Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Barat	4	4	4	4	100%	4	12	100%

SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA - JAKBAR	2.16.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai Kepuasan terhadap Layanan Penyediaan Makanan dan Minuman pada Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Barat	4	4	4	4	4	100%	4	12	100%	
SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA - JAKBAR	2.16.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Pertengkapan Kantor	Nilai Kepuasan terhadap Pelayanan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Barat	4	4	4	4	4	100%	4	12	100%	
SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA - JAKBAR	2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai kepuasan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan di Sudin Kominfoik Kota Administrasi Jakarta Barat	4	4	4	4	4	100%	4	12	100%	
SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA - JAKBAR	2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumentasi dan Publikasi yang dikelola pada lingkup Kota Administrasi Jakarta Barat	500	500	500	1045	500	209%	500	2045	100%	

SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA - JAKBAR	2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Laporan fasilitas pelayanan informasi publik	1	1	1	1	100%	1	3	100%
SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA - JAKBAR	2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase Pengelolaan dan Layanan Local Area Network di tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat	100	100	100	100	100%	100	300	100%
SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA - JAKBAR	2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disosialisasikan dan dimonitor di Pemerintah Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat	4	4	4	4	100%	4	12	100%
SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA - JAKBAR	2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah fasilitas Pemerintah Daerah dalam pengembangan sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi di tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat	1	1	1	2	200%	1	4	100%
SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA - JAKSEL	2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Kepuasan terhadap Layanan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4	4	4	4	100%	4	12	100%

SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA - JAKSEL	2.16.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	4	4	4	4	4	4	100%	4	12	100%	
SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA - JAKSEL	2.16.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	4	4	4	4	4	4	100%	4	12	100%	
SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA - JAKSEL	2.16.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4	4	4	4	4	4	100%	4	12	100%	
SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA - JAKSEL	2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4	4	4	4	4	4	100%	4	12	100%	
SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA - JAKSEL	2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	500	500	500	703	500	500	141%	500	1703	100%	
SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA - JAKSEL	2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	1	1	1	1	1	1	100%	1	3	100%	

SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA - JAKSEL	2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase perangkat daerah/unit perangkat daerah dan/atau instansi pemerintah pusat yang terkoneksi dengan jaringan intra pemerintah daerah	100	100	100	100	100	100	100	300	100%
SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA - JAKSEL	2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disosialisasikan dan dimonitor di Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	4	4	4	4	4	4	4	12	100%
SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA - JAKSEL	2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah fasilitasi Pemerintah Daerah dalam pengembangan sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi di tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan	1	1	1	1	1	1	1	3	100%
SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA - JAKTIM	2.16.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai Kepuasan Pelayanan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4	4	4	4	4	4	4	12	100%

SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA - JAKTIM	2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Kepuasan terhadap Layanan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4	4	4	4	4	4	100%	4	12	100%	
SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA - JAKTIM	2.16.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Nilai Kepuasan terhadap Layanan Penyediaan Bahan/Material	4	4	4	4	4	4	100%	4	12	100%	
SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA - JAKTIM	2.16.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Nilai Kepuasan terhadap Layanan Penyediaan Makanan dan Minuman	4	4	4	4	4	4	100%	4	12	100%	
SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA - JAKTIM	2.16.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Kepuasan terhadap Layanan Peralatan dan Perlengkapan Kerja pada Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Timur	4	4	4	4	4	4	100%	4	12	100%	
SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA - JAKTIM	2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai kepuasan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4	4	4	4	4	4	100%	4	12	100%	
SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA - JAKTIM	2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai kepuasan terhadap Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4	4	4	4	4	4	N/A	4	N/a	N/a	

SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA - JAKTIM	2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah dokumentasi dan publikasi yang dikelola pada lingkup kota administrasi Jakarta timur	1200	1200	1200	4394	366%	1200	6794	100%	
SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA - JAKTIM	2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	laporan fasilitas pelayanan informasi publik	1	1	1	1	100%	1	3	100%	
SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA - JAKTIM	2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase Pengelolaan dan Layanan Local Area Network di tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur	100	100	100	100	100%	100	300	100%	
SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA - JAKTIM	2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disosialisasikan dan dimonitor di Pemerintah Daerahkabupaten/kota	4	4	4	4	100%	4	12	100%	
SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA - JAKTIM	2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Persentase aplikasi layanan publik dan layanan pemerintah yang menggunakan pusat data pemerintah daerah/nasional di tingkat Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100%	100	300	100%	

SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA - JAKTIM	2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah fasilitas pemerintah daerah dalam pengembangan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi di tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur	1	1	1	1	1	100%	1	3	100%
SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN - KEP.SERIBU	2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Kepuasan terhadap Layanan Penyediaan Alat Tulis Kantor Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi	4	4	4	4	4	100%	4	12	100%
SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN - KEP.SERIBU	2.16.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Nilai Kepuasan Terhadap Penyediaan Bahan/Material	4	4	4	4	4	100%	4	12	100%
SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN - KEP.SERIBU	2.16.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Nilai Kepuasan terhadap Layanan Penyediaan Makanan dan Minuman pada Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi	4	4	4	4	4	100%	4	12	100%
SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN - KEP.SERIBU	2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Kepuasan terhadap Layanan Penyediaan Sewa Sarana Mobilitas air pada Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi	4	4	4	4	4	100%	4	12	100%

SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN - KEP.SERIBU	2.16. 01.2. 07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Kepuasan terhadap Layanan Penyediaan Sewa Rumah Dinas pada Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi	4	4	4	4	4	4	100%	4	12	100%	
SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN - KEP.SERIBU	2.16. 01.2. 08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai kepuasan pelayanan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4	4	4	4	4	4	100%	4	12	100%	
SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN - KEP.SERIBU	2.16. 01.2. 08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Kepuasan terhadap Layanan Peralatan dan Perlengkapan Kerja pada Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi	4	4	4	4	4	4	100%	4	12	100%	
SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN - KEP.SERIBU	2.16. 01.2. 09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai kepuasan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4	4	4	4	4	4	100%	4	12	100%	

SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK - KABUPATEN - KEP.SERIBU	2.16.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai kepuasan penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sudin Kominfo/ Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu	4	4	4	4	100%	4	12	100%	
SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK - KABUPATEN - KEP.SERIBU	2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumentasi dan Publikasi yang dikelola pada lingkup Kota Administrasi	500	500	1076	500	215%	500	2076	100%	
SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK - KABUPATEN - KEP.SERIBU	2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase pengelolaan dan layanan Local Area Network di tingkat Kota Administrasi	100	100	100	100	100%	100	300	100%	
JSC	2.16.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Peningkatan dan Pelayanan Layanan Jakarta Smart City	1	1	1	1	100%	1	1	100%	
JSC	2.16.03.1.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Pilar Kota Cerdas yang tercapai	6	6	6	6	100%	6	6	100%	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Provinsi DKI Jakarta s.d. Tahun 2022

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Target Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				NIHIL								

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota memiliki tugas menyelenggarakan pelayanan bidang komunikasi dan informatika berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang komunikasi dan informatika, berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika

Nomor 22/PER/M. KOMINFO/12/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota SPM bidang komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. target standar pelayanan; b. panduan operasional SPM bidang komunikasi dan informatika di Kabupaten/ Kota. Adapun jenis pelayanan dasar yang dimaksud adalah Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional dan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat.

Sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur urusan pemerintahan, urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian masuk dalam urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sehingga urusan tersebut tidak memiliki standard pelayanan minimal.

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta

Dengan kedudukan DKI Jakarta sebagai ibukota Negara yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelayanan dengan standarisasi tinggi menjadi tuntutan masyarakat luas. Dengan kedudukan yang demikian, DKI Jakarta menjadi barometer bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada umumnya dalam mengelola birokrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam melayani masyarakat. Untuk itulah, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu penopang utama berhasil tidaknya upaya layanan publik dalam kerangka keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan (*open government*) yang lebih transparan dan akuntabel. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta memiliki urusan terkait komunikasi, informatika, statistik dan persandian. Pada tataran ini, pengelolaan teknologi informasi dan statistik merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, terutama layanan berbasis IT, dan pembangunan yang menyejahterakan masyarakat.

Berbagai permasalahan hadir dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pelayanan publik berbasis IT dan terbatasnya akses masyarakat dan aparatur pada keterbukaan informasi publik untuk segera dicarikan solusi inovatif

terbaik sehingga terwujud pemerintahan yang *accountable*, *participatory* dan *transparent*.

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK), sebagaimana diketahui bersama, dapat menjadi faktor akselerasi pembangunan, karenanya peluang untuk mempercepat pembangunan berbasis teknologi informasi dan komunikasi haruslah dimanfaatkan dengan baik oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dengan semakin pesatnya perkembangan di dunia teknologi informasi dan semakin mudahnya publik mengakses informasi kapanpun dan dimanapun, kelengkapan infrastruktur perangkat lunak dan perangkat keras haruslah dapat mengimbangi kebutuhan yang ada.

Ketimpangan antara perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terjadi dan kesiapan infrastruktur wilayah dapat menyebabkan eksese negatif terhadap pembangunan yang berlangsung dan penanganan ekspektasi masyarakat yang cenderung telah siap dalam memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut. Dalam hal ini, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur pelaksana otonomi daerah urusan komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian memegang peranan penting dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Provinsi DKI Jakarta.

Permasalahan pokok Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat dari dua sisi:

- (1) masyarakat, sebagai bagian dari pemerintahan, yakni “terbatasnya informasi publik yang dapat diperoleh masyarakat” sehingga menjadi penghambat layanan aparatur pemerintahan kepada masyarakat; dan
- (2) lembaga perangkat daerah, sebagai pelaksana pemerintahan, yakni “sebagian OPD belum memanfaatkan TIK secara optimal dan terintegrasi untuk menunjang kinerja layanannya” sehingga berdampak pada kinerja layanan aparatur pemerintahan di Provinsi DKI Jakarta yang tidak optimal dan terintegrasi.

Selain itu, masih adanya SKPD/UKPD yang *hosting* dan menggunakan jaringan di luar Pemprov DKI Jakarta juga menjadi isu strategis berikutnya yang menyebabkan permasalahan belum terintegrasinya sistem jaringan antar SKPD/UKPD di Provinsi DKI Jakarta. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan

bahwa terdapat 2 (dua) permasalahan pokok yang dihadapi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta:

1. Terbatasnya informasi publik yang dapat diperoleh masyarakat;
2. Sebagian OPD belum memanfaatkan TIK secara optimal dan terintegrasi untuk menunjang kinerja layanannya.

Akibatnya berdampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/ internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals). Ketidakefektifan pemanfaatan TIK tersebut disebabkan antara lain karena kapasitas SDM teknis pemerintahan TIK yang lemah sehingga pemahaman terhadap TIK itu sendiri masih kurang yang pada akhirnya menghambat proses integrasi TIK di semua lini pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.

Lemahnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan peran-peran pemerintahan haruslah ditangani dengan lebih serius di masa depan, hal ini dilakukan untuk dapat mewujudkan pelayanan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi elektronik (*eGovernment*) yang dapat memberikan efisiensi, ketersebaran yang lebih merata, dan transparansi pelayanan. Penerapan *eGovernment* dikembangkan tidak hanya untuk mengikuti *trend* yang terjadi di kalangan masyarakat, namun juga untuk mewujudkan pelayanan yang merata, rendah biaya, dan dapat dirasakan oleh seluruh kalangan masyarakat.

Kesadaran unit organisasi dalam mengembangkan pelayanan berbasis *eGovernment* mulai meningkat namun masih ditemukan pembangunan sistem informasi dan aplikasi secara terpisah-pisah. Hal tersebut juga terjadi di Pemda DKI Jakarta dimana aplikasi dan database yang ada di setiap Perangkat Daerah masih belum terintegrasi secara menyeluruh satu dengan yang lain. Pengamanan jaringan dan data juga menjadi salah satu permasalahan dalam penerapan TIK.

Hal lain yang menjadi isu strategis terkait urusan komunikasi adalah perkembangan media komunikasi melalui media massa termasuk sosial media yang memengaruhi opini masyarakat. Tingginya komunikasi melalui sosial media membuat informasi mudah tersebar dan masyarakat dengan mudah mempercayai

berita yang tersebar melalui jaringan komunikasi berbasis internet sehingga jika hal ini tidak diantisipasi oleh Pemerintah termasuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat mengganggu keamanan nasional dan global.

Dengan menilik kembali pada permasalahan-permasalahan yang terjadi diatas, aspek pemerataan pelayanan informasi adalah salah satu isu utama yang menjadi perhatian di masa depan. Di lain sisi, melihat bentang geografis dan tingkat pertumbuhan di Provinsi DKI Jakarta, wilayah Kepulauan Seribu cenderung memiliki hambatan yang lebih besar dibandingkan dengan wilayah DKI Jakarta yang berada di daratan utama. Untuk itu, harus ada sebuah tindakan strategis yang khusus diberikan dalam rangka memenuhi pelayanan yang adil kepada masyarakat yang tinggal di wilayah Kepulauan Seribu.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD)

Pada Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta, sub kegiatan sudah sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2023-2026.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan masyarakat untuk tahun 2024 terdapat dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat Kelurahan. Program ini telah dilaksanakan pada awal tahun 2023. Diawali dengan rembug warga kemudian dilanjutkan dengan rapat koordinasi pembangunan tingkat kelurahan. Program dan kegiatan yang diusulkan mulai dari tingkat RW akan dibawa ke tingkat Kelurahan dan kemudian diteruskan ke musyawarah pembangunan tingkat kecamatan dan akan dipilih kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 baik oleh Kelurahan, Kecamatan ataupun diteruskan ke Perangkat Daerah yang terkait di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

TUJUAN & SASARAN

PERANGKAT DAERAH

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan



3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berkenaan dengan Perbaikan Tata Laksana Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bahwa Arsitektur SPBE Nasional bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu secara nasional. Sementara itu, salah satu Arah Kebijakan dan Strategi SPBE dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi diantaranya adalah terkait dengan penyediaan berkualitas data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas untuk : (a) memenuhi kebutuhan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, dan penyusunan program kegiatan; (b) menjaga keamanan data dan informasi yang bersifat strategis dan rahasia dalam rangka mewujudkan kedaulatan informasi pemerintah dengan : (1) menerapkan manajemen data yang terpadu; (2) menerapkan manajemen keamanan informasi yang terpadu; dan (3) menggunakan teknologi analitik data dan kecerdasan buatan.

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Untuk mempercepat pembangunan SPBE kedepan, pemerintah perlu berupaya maksimal, salah satunya melalui kolaborasi penyelenggaraan SPBE dengan Satu Data Indonesia (SDI). Penguatan tata kelola SPBE, infrastruktur SPBE, dan

percepatan SPBE sebagai fondasi pelaksanaan SPBE yang terpadu dan komprehensif serta mendukung terciptanya SDI yang terintegrasi nasional.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia dijelaskan bahwa Pengaturan Satu Data Indonesia bertujuan untuk : (a). memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan; (b). mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan; (c). mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perrumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan (d). mendukung sistem statistik nasional peraturan perundang-undangan. Sementara itu terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia, Penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat daerah dilaksanakan oleh: (a). Pembina Data tingkat daerah; (b). Walidata tingkat daerah; (c). Walidata pendukung; dan (d). Produsen Data tingkat daerah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Wali Data adalah unit pada instansi pusat dan perangkat daerah yang membidangi urusan statistik melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarluaskan data. Sementara itu, dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pengumpulan dan Pertukaran Data Elektronik di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Walidata adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan Fungsi Komunikasi, Informatika dan Statistik. Sesuai ketentuan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 144 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian.

Untuk itu, Penyelenggaraan Walidata Daerah merupakan tugas dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik.

Berkenaan dengan hal tersebut, diperlukan upaya identifikasi dan analisis terhadap kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan komunikasi, informatika dan statistik di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna menyusun berbagai program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta periode 4 (empat) tahun ke depan. DKI Jakarta sebagai ibukota negara diharapkan menjadi role model dan barometer pembangunan, terutama dalam implementasi pemanfaatan TIK dan smart city yang terintegrasi antara kabupaten/kota, provinsi dan pemerintah pusat. Dengan adanya rencana strategis ini diharapkan pembangunan bisa sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPD Provinsi DKI Jakarta serta selaras dengan RPJMN.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta sebagai organisasi perangkat daerah yang membidangi komunikasi, informatika dan statistik diharapkan mampu memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan bidang komunikasi, informatika dan statistik kepada masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi dapat terlaksana. Dengan upaya pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik di bidang komunikasi, informatika dan statistik yang dilaksanakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik maka diharapkan masyarakat akan lebih partisipatif memanfaatkan komunikasi dan informatika melalui implementasi e-Government dalam rangka terwujudnya reformasi birokrasi di DKI Jakarta, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2023 merujuk kepada Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Di mana tujuannya adalah mendukung tercapainya Misi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026.

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran RPD
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Tahun
2023-2026

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-			
			2023	2024	2025	2026
1	Peningkatan Pengelolaan dan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	Tingkat Kematangan Pengelolaan dan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	5	5	5	5
	Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	94	94	95	95
2	Peningkatan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Tingkat Kematangan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	3	3	4	4
	Peningkatan Kualitas Layanan Teknologi Informasi Dan Komunikasi	Persentase Pemenuhan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	100	100	100	100
3	Penyediaan Data, Informasi, dan Statistik yang Akurat untuk Analisis Kebijakan	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	3	3	4	4
	Peningkatan Penggunaan Data dalam Proses Perencanaan Pembangunan di Daerah	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi	100	100	100	100

		pembangunan				
4	Peningkatan Keamanan Informasi	Tingkat Kematangan Keamanan SPBE	3	3	3	4
	Peningkatan Manajemen Keamanan Informasi	Tingkat Maturitas Keamanan Siber	4	4	4	4
5	Meningkatnya tata kelola diskominfotik yang baik	Nilai Akuntabilitas (AKIP) Diskominfotik	93,59	93,79	93,99	94,19
	Meningkatnya kinerja kinerja diskominfotik	Rata-rata capaian IKU	100	100	100	100

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam memberi dukungan terhadap pembangunan DKI Jakarta demi terwujudnya pembangunan DKI Jakarta demi terwujudnya visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur, maka berbagai upaya telah dilakukan oleh Dinas, Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta agar memberikan hasil yang optimal pada pencapaian Indikator Kinerja yang di dukung oleh Program dan Kegiatan sesuai Urusan yang diampu oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta,

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK), sebagaimana diketahui bersama, dapat menjadi faktor akselerasi pembangunan, karenanya peluang untuk mempercepat pembangunan berbasis teknologi informasi dan komunikasi haruslah dimanfaatkan dengan baik oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dengan semakin pesatnya perkembangan di dunia teknologi informasi dan semakin mudahnya publik mengakses informasi kapanpun dan dimanapun, kelengkapan infrastruktur perangkat lunak dan perangkat keras haruslah dapat mengimbangi kebutuhan yang ada. Ketimpangan antara perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terjadi dan kesiapan infrastruktur wilayah dapat menyebabkan eksekusi negatif terhadap pembangunan yang berlangsung dan

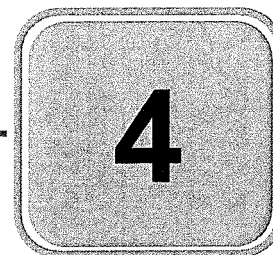
penanganan ekspektasi masyarakat yang cenderung telah siap dalam memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut. Dalam hal ini, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur pelaksana otonomi daerah urusan komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian memegang peranan penting dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Provinsi DKI Jakarta.

Pada Rancangan Akhir Renja 2024 menggunakan program dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang “Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah” Program yang terkait antara lain :

1. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektorial
4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Untuk Kegiatan dan Sub kegiatan yang digunakan akan dijabarkan lebih rinci pada BAB selanjutnya.

RENCANA KERJA & PENDANAAN PERANGKAT DAERAH



Renja Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta merupakan perangkat daerah yang mendukung tujuan RPD keempat yaitu terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas dengan sasaran Terakselerasinya Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas. Tujuan dan Sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam RPD DKI Jakarta ini

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi, yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah. Penyusunannya berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berikut ini Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dapat dilihat sesuai tabel 4.1:

Tabel 4.1

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

PD/ UKPD	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Keg/ Sub Keg	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Keb Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dinas Kominfo	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jakarta	4		APBD	-	4	-
Dinas Kominfo	2.16.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	Jakarta	100		APBD	-	100	-
Dinas Kominfo	2.16.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jakarta	1	50.400.000	APBD	-	1	55.440.000
Dinas Kominfo	2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	Jakarta	3		APBD	-	3	-
Dinas Kominfo	2.16.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jakarta	255	112.713.554.800	APBD	-	264	123.984.910.280
Dinas Kominfo	2.16.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jakarta	1	9.000.000	APBD	-	1	9.900.000
Dinas Kominfo	2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	Jakarta	4		APBD	-	4	-
Dinas Kominfo	2.16.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jakarta	1	71.432.555	APBD	-	1	78.575.811
Dinas Kominfo	2.16.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jakarta	1	99.453.015	APBD	-	1	109.398.317
Dinas Kominfo	2.16.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jakarta	1	305.929.631	APBD	-	1	336.522.594

PD/ UKPD	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Keg/ Sub Keg	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju 2025		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target	Keb Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dinas Kominfotik	2.16.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jakarta	1	50.500.000	APBD		1	55.550.000
Dinas Kominfotik	2.16.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien	Jakarta	3		APBD		3	-
Dinas Kominfotik	2.16.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jakarta	1	110.926.616	APBD		1	122.019.278
Dinas Kominfotik	2.16.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jakarta	4	80.021.232	APBD		0	88.023.355
Dinas Kominfotik	2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jakarta	4		APBD		4	-
Dinas Kominfotik	2.16.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jakarta	1	34.210.955	APBD		1	37.632.051
Dinas Kominfotik	2.16.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jakarta	1	263.416.320	APBD		1	289.757.952
Dinas Kominfotik	2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jakarta	4		APBD		4	-
Dinas Kominfotik	2.16.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jakarta	20	281.493.936	APBD		17	309.643.330
Dinas Kominfotik	2.16.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jakarta	32	114.052.800	APBD		0	125.458.080

PD/ UKPD	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Keg/ Sub Keg	Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target	Keb Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dinas Kominfotik	2.16.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jakarta	1	2.930.400	APBD		1	3.223.440
Dinas Kominfotik	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Pemenuhan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	Jakarta	100		APBD		100	-
Dinas Kominfotik	2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase informasi yang dikemas dan diproduksi oleh Pemprov DKI Jakarta terhadap isu yang berkembang di media massa dan/atau perlu dilakukan klarifikasi	Jakarta	100		APBD		100	-
Dinas Kominfotik	2.16.02.1.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jakarta	12	4.704.803.096	APBD		12	5.175.283.406
Dinas Kominfotik	2.16.02.1.01.03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jakarta	4	10.171.480.797	APBD		4	11.188.628.877
Dinas Kominfotik	2.16.02.1.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jakarta	1	3.249.600.000	APBD		1	3.574.560.000
Dinas Kominfotik	2.16.02.1.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jakarta	1	1.573.718.716	APBD		1	1.731.090.588
Dinas Kominfotik	2.16.02.1.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Jakarta	1	4.404.766.578	APBD		1	4.845.243.236
Dinas Kominfotik	2.16.02.1.01.07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Jakarta	3	8.335.883.550	APBD		3	9.169.471.905
Dinas	2.16.02.1.01.08	Kemitraan dengan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan	Jakarta	1	7.361.861.433	APBD		1	8.098.047.576

PD/ UKPD	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Keg/ Sub Keg	Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target	Keb Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kominfofik		Pemangku Kepentingan	Pemangku Kepentingan							
Dinas Kominfofik	2.16.02.1.01.09	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	Jakarta	1	615.000.000	APBD	-	1	676.500.000
Dinas Kominfofik	2.16.02.1.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	Jakarta	800	280.753.992	APBD	-	800	308.829.391
Dinas Kominfofik	2.16.02.1.01.11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jakarta	2	4.261.631.196	APBD	-	2	4.687.794.316
Dinas Kominfofik	2.16.02.1.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Jakarta	1	5.175.043.355	APBD	-	1	5.692.547.691
Dinas Kominfofik	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Jumlah pemenuhan layanan Teknologi Informatika dan Komunikasi	Jakarta	51		APBD	-	51	-
Dinas Kominfofik	2.16.03.1.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Service Level Agreement Jaringan	Jakarta	99		APBD	-	99	-
Dinas Kominfofik	2.16.03.1.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jakarta	51	146.136.935.617	APBD	-	51	160.750.629.179
Dinas Kominfofik	2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Presentase Perangkat Daerah pengguna layanan aplikasi, sistem komunikasi intra pemerintah daerah dan pusat data pemerintah daerah/pusat terintegrasi	Jakarta	100		APBD	-	100	-
Dinas	2.16.03.1.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan	Jakarta	1	190.200.000	APBD	-	1	209.220.000

PD/UKPD	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Keg/ Sub Keg	Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target	Keb Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kominfofik		dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi							
Dinas Kominfofik	2.16.03.1.02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jakarta	1	299.600.000	APBD	-	1	329.560.000
Dinas Kominfofik	2.16.03.1.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Jakarta	1	18.783.080.549	APBD	-	1	20.661.388.604
Dinas Kominfofik	2.16.03.1.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintahan Daerah	Jakarta	1	12.397.670.340	APBD	-	1	13.637.437.374
Dinas Kominfofik	2.16.03.1.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Jakarta	1	1.860.600.000	APBD	-	1	2.046.660.000
Dinas Kominfofik	2.16.03.1.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik Yang Terhubung Dengan Sistem Peghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jakarta	10	11.750.831.598	APBD	-	10	12.925.914.758
Dinas Kominfofik	2.16.03.1.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jakarta	1	13.885.573.055	APBD	-	1	15.274.130.361
Dinas Kominfofik	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Pemenuhan Data Prioritas	Jakarta	100		APBD	-	100	-
Dinas Kominfofik	2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Jakarta	100		APBD	-	100	-

PD/ UKPD	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Keg/ Sub Keg	Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target	Keb Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dinas Kominfotik	2.20.02.1.01.02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jakarta	51	55.200.000	APBD	-	51	60.720.000
Dinas Kominfotik	2.20.02.1.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Jakarta	1	2.608.054.546	APBD	-	1	2.868.860.001
Dinas Kominfotik	2.20.02.1.01.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah data Statistik Sektoral yang Dihimpun	Jakarta	1	1.947.000.000	APBD	-	1	2.141.700.000
Dinas Kominfotik	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase perangkat daerah Provinsi yang telah menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah	Jakarta	98		APBD	-	98	-
Dinas Kominfotik	2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Pelayanan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Jakarta	3		APBD	-	3	-
Dinas Kominfotik	2.21.02.1.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Provinsi	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	Jakarta	1	598.772.500	APBD	-	1	658.649.750
Dinas Kominfotik	2.21.02.1.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jakarta	1	5.460.178.245	APBD	-	1	6.006.196.070
Dinas Kominfotik	2.21.02.1.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Jakarta	50	2.667.600.000	APBD	-	50	2.934.360.000

PD/ UKPD	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Keg/ Sub Keg	Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target	Keb Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Jakpus	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jakarta	4		APBD	-	4	-
Jakpus	2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	Jakarta	3		APBD	-	3	-
Jakpus	2.16.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jakarta	1	6.010.000	APBD	-	1	6.611.000
Jakpus	2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	Jakarta	4		APBD	-	4	-
Jakpus	2.16.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jakarta	1	10.489.500	APBD	-	1	11.538.450
Jakpus	2.16.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jakarta	1	12.041.400	APBD	-	1	13.245.540
Jakpus	2.16.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan	Jakarta	1	32.927.040	APBD	-	1	36.219.744
Jakpus	2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Miik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Miik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jakarta	4		APBD	-	4	-
Jakpus	2.16.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jakarta	3	7.626.296	APBD	-	3	8.388.926
Jakpus	2.16.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jakarta	4	4.603.392	APBD	-	4	5.063.731

PD/ UKPD	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Keg/ Sub Keg	Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target	Keb Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Jakpus	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	4	Jakarta			APBD	-	0	-
Jakpus	2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	Jakarta	100		APBD	-	100	-
Jakpus	2.16.02.1.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Persentase informasi yang dikemas dan diproduksi oleh Pemprov DKI Jakarta terhadap isu yang berkembang di media massa dan/atau perlu dilakukan klarifikasi	Jakarta	1	1.644.141.234	APBD	-	1	1.808.555.357
Jakpus	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	4	Jakarta			APBD	-	0	-
Jakpus	2.16.03.1.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah pemenuhan layanan Teknologi Informatika dan Komunikasi	Jakarta	99		APBD	-	99	-
Jakpus	2.16.03.1.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Service Level Agreement Jaringan	Jakarta			APBD	-	0	1.021.529.299
Jakpus	2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jakarta		928.662.999	APBD	-	0	-
Jakpus	2.16.03.1.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Perangkat Daerah pengguna layanan aplikasi, sistem komunikasi intra pemerintah daerah dan pusat data pemerintah daerah/pusat terintegrasi	Jakarta	100		APBD	-	100	-
Jakpus	2.16.03.1.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penataaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Jakarta	1	149.160.000	APBD	-	1	164.076.000

PD/ UKPD	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Keg/ Sub Keg	Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target	Keb Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Provinsi	Daerah Provinsi							
Jakpus	2.16.03.1.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembangunan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jakarta	1	6.477.960	APBD	-	1	7.125.756
Jakpus	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase perangkat daerah Provinsi yang telah menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah	Jakarta			APBD	-	0	-
Jakpus	2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Pelayanan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Jakarta	3		APBD	-	3	-
Jakpus	2.21.02.1.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Jakarta	12	91.200.000	APBD	-	12	100.320.000
Jaksel	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jakarta	4		APBD	-	4	-
Jaksel	2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	Jakarta	3		APBD	-	3	-
Jaksel	2.16.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jakarta	1	2.000.000	APBD	-	1	2.200.000
Jaksel	2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	Jakarta	4		APBD	-	4	-
Jaksel	2.16.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Paket Peralatan dan Perengkapan Kantor yang	Jakarta	1	10.413.293	APBD	-	1	11.454.622

PD/ UKPD	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Keg/ Sub Keg	Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target	Keb Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Perengkapan Kantor	Disediakan							
Jaksel	2.16.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jakarta	1	9.748.109	APBD	-	1	10.722.920
Jaksel	2.16.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jakarta	1	18.411.400	APBD	-	1	20.252.540
Jaksel	2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jakarta	4		APBD	-	4	-
Jaksel	2.16.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan	Jakarta	1	32.927.040	APBD	-	1	36.219.744
Jaksel	2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jakarta	4		APBD	-	4	-
Jaksel	2.16.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jakarta	4	19.333.437	APBD	-	4	21.266.781
Jaksel	2.16.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jakarta	6	5.178.816	APBD		6	5.696.698
Jaksel	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Pemenuhan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	Jakarta			APBD	-		-
Jaksel	2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase informasi yang dikemas dan diproduksi oleh Pemprov DKI Jakarta terhadap isu yang berkembang di media massa	Jakarta	100		APBD	-	100	-

PD/ UKPD	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Keg/ Sub Keg	Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target	Keb Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			dan/atau perlu dilakukan klarifikasi							
Jaksel	2.16.02.1.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jakarta	1	1.440.377.701	APBD	-	1	1.584.415.471
Jaksel	2.16.02.1.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jakarta	1	21.695.025	APBD	-	1	23.864.528
Jaksel	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Jumlah pemenuhan layanan Teknologi Informatika dan Komunikasi	Jakarta			APBD	-		-
Jaksel	2.16.03.1.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Service Level Agreement Jaringan	Jakarta	99		APBD	-	99	-
Jaksel	2.16.03.1.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jakarta		756.103.677	APBD	-		831.714.045
Jaksel	2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Presentase Perangkat Daerah pengguna layanan aplikasi, sistem komunikasi intra pemerintah daerah dan pusat data pemerintah daerah/pusat terintegrasi	Jakarta	100		APBD	-	100	-
Jaksel	2.16.03.1.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jakarta	1	207.300.870	APBD	-	1	228.030.957
Jaksel	2.16.03.1.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jakarta	1	34.511.898	APBD	-	1	37.963.088

PD/ UKPD	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Keg/ Sub Keg	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Keb Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Daerah								
Jaksel	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase perangkat daerah Provinsi yang telah menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah	Jakarta			APBD	-		-
Jaksel	2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Pelayanan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Jakarta	3		APBD	-	3	-
Jaksel	2.21.02.1.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	Jakarta	1	109.200.000	APBD	-	1	120.120.000
Jakbar	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jakarta	4		APBD	-	4	-
Jakbar	2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	Jakarta	3		APBD	-	3	-
Jakbar	2.16.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jakarta	1	1.500.000	APBD	-	1	1.650.000
Jakbar	2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	Jakarta	4		APBD	-	4	-
Jakbar	2.16.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jakarta	1	4.522.140	APBD	-	1	4.974.354
Jakbar	2.16.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jakarta	1	5.244.750	APBD	-	1	5.769.225
Jakbar	2.16.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jakarta	1	11.600.000	APBD	-	1	12.760.000
Jakbar	2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jakarta	4		APBD	-	4	-
Jakbar	2.16.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jakarta	1	32.927.040	APBD	-	1	36.219.744

PD/ UKPD	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Keg/ Sub Keg	Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target	Keb Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			yang Disediakan							
Jakbar	2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jakarta	4		APBD	-	4	-
Jakbar	2.16.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya	Jakarta	3	15.489.504	APBD	-	3	17.038.454
Jakbar	2.16.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jakarta	78	-	APBD	-	78	-
Jakbar	2.16.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jakarta	6	4.062.600	APBD	-	6	4.468.860
Jakbar	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Pemenuhan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	Jakarta			APBD	-	0	-
Jakbar	2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase informasi yang dikemas dan diproduksi oleh Pemprov DKI Jakarta terhadap isu yang berkembang di media massa dan/atau perlu dilakukan klarifikasi	Jakarta	100		APBD	-	100	-
Jakbar	2.16.02.1.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jakarta	1	1.422.073.170	APBD	-	1	1.564.280.487
Jakbar	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Jumlah pemenuhan layanan Teknologi Informatika dan Komunikasi	Jakarta			APBD	-	0	-
Jakbar	2.16.03.1.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Service Level Agreement Jaringan	Jakarta	99		APBD	-	99	-
Jakbar	2.16.03.1.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jakarta		1.039.531.254	APBD	-	0	1.143.484.379
Jakbar	2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Perangkat Daerah pengguna layanan aplikasi, sistem komunikasi intra pemerintah daerah	Jakarta	100		APBD	-	100	-

PD/ UKPD	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Keg/ Sub Keg	Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target	Keb Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			dan pusat data pemerintah daerah/pusat terintegrasi							
Jakbar	2.16.03.1.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jakarta	1	112.134.929	APBD	-	1	123.348.422
Jakbar	2.16.03.1.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Jakarta	1	19.741.794	APBD		1	21.715.973
Jakbar	2.16.03.1.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jakarta	1	-	APBD	-	1	-
Jakbar	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase perangkat daerah Provinsi yang telah menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah	Jakarta			APBD	-	0	-
Jakbar	2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Pelayanan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Jakarta	3		APBD	-	3	-
Jakbar	2.21.02.1.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Jakarta	12	120.800.000	APBD	-	12	132.880.000
Jaktim	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jakarta	4		APBD	-	4	-
Jaktim	2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	Jakarta	3		APBD	-	3	-
Jaktim	2.16.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jakarta	1	2.750.000	APBD	-	1	3.025.000
Jaktim	2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	Jakarta	4		APBD	-	4	-
Jaktim	2.16.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jakarta	1	49.938.305	APBD	-	1	54.932.136

PD/ UKPD	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Keg/ Sub Keg	Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target	Keb Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Jaktim	2.16.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jakarta	1	28.346.137	APBD	-	1	31.180.751
Jaktim	2.16.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jakarta	1	22.053.000	APBD	-	1	24.258.300
Jaktim	2.16.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien	Jakarta	3	-	APBD	-	3	-
Jaktim	2.16.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jakarta	1	0	APBD	-	1	-
Jaktim	2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jakarta	4	-	APBD	-	4	-
Jaktim	2.16.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jakarta	1	32.927.040	APBD	-	1	36.219.744
Jaktim	2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jakarta	4	-	APBD	-	4	-
Jaktim	2.16.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jakarta	3	27.066.264	APBD	-	3	29.772.890
Jaktim	2.16.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jakarta	12	10.219.104	APBD	-	12	11.241.014
Jaktim	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Pemenuhan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	Jakarta	0	-	APBD	-	0	-
Jaktim	2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase informasi yang dikemas dan diproduksi oleh Pemprov DKI Jakarta terhadap isu yang berkembang di media massa	Jakarta	100	-	APBD	-	100	-

PD/ UKPD	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Keg/ Sub Keg	Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target	Keb Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			dan/atau perlu dilakukan klarifikasi							
Jaktim	2.16.02.1.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jakarta	1	1.359.220.376	APBD	-	1	1.495.142.414
Jaktim	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Jumlah pemenuhan layanan Teknologi Informatika dan Komunikasi	Jakarta			APBD	-	0	-
Jaktim	2.16.03.1.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Service Level Agreement Jaringan	Jakarta	99		APBD	-	99	-
Jaktim	2.16.03.1.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jakarta	51	1.297.125.553	APBD	-	51	1.426.838.108
Jaktim	2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Presentase Perangkat Daerah pengguna layanan aplikasi, sistem komunikasi intra pemerintah daerah dan pusat data pemerintah daerah/pusat terintegrasi	Jakarta	100		APBD	-	100	-
Jaktim	2.16.03.1.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jakarta	1	221.334.929	APBD	-	1	243.468.422
Jaktim	2.16.03.1.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Jakarta		0	APBD	-	0	-
Jaktim	2.16.03.1.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintahan Daerah	Jakarta	1	58.388.719	APBD	-	1	64.227.591
Jaktim	2.20.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jakarta	4		APBD	-	4	-

PD/ UKPD	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Keg/ Sub Keg	Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target	Keb Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		DAERAH PROVINSI								
Jaktim	2.20.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jakarta	4		APBD	-	4	-
Jaktim	2.20.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jakarta	1		APBD	-	1	-
Jaktim	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase perangkat daerah Provinsi yang telah menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah	Jakarta			APBD	-	0	-
Jaktim	2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Pelayanan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Jakarta	3		APBD	-	3	-
Jaktim	2.21.02.1.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Jakarta	12	199.334.929	APBD	-	12	219.268.422
Jakut	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jakarta	4		APBD	-	4	-
Jakut	2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	Jakarta	3		APBD	-	3	-
Jakut	2.16.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jakarta	1	3.000.000	APBD	-	1	3.300.000
Jakut	2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	Jakarta	4		APBD	-	4	-
Jakut	2.16.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jakarta	1	49.397.965	APBD	-	1	54.337.762
Jakut	2.16.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jakarta	1	14.095.513	APBD	-	1	15.505.064

PD/ UKPD	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Keg/ Sub Keg	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target		Keb Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Jakut	2.16.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jakarta	1	20.064.540	APBD	-	1	22.070.994	
Jakut	2.16.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien	Jakarta	4		APBD		4	-	
Jakut	2.16.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jakarta	9	10.769.220	APBD		9	11.846.142	
Jakut	2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jakarta	4		APBD		4	-	
Jakut	2.16.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jakarta	1	32.927.040	APBD		1	36.219.744	
Jakut	2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jakarta	4		APBD		4	-	
Jakut	2.16.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizannya	Jakarta	4	35.814.241	APBD		4	39.395.665	
Jakut	2.16.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jakarta	10	0	APBD		10	-	
Jakut	2.16.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jakarta	5	2.708.400	APBD		5	2.979.240	
Jakut	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Pemenuhan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	Jakarta			APBD		0	-	
Jakut	2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase informasi yang dikemas dan diproduksi oleh Pemprov DKI Jakarta terhadap isu yang berkembang di media massa	Jakarta	100		APBD		100	-	

PD/ UKPD	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Keg/ Sub Keg	Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target	Keb Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			dan/atau perlu dilakukan klarifikasi							
Jakut	2.16.02.1.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jakarta	1	1.276.079.292	APBD	-	1	1.403.687.221
Jakut	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Jumlah pemenuhan layanan Teknologi Informatika dan Komunikasi	Jakarta			APBD	-	0	-
Jakut	2.16.03.1.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Service Level Agreement Jaringan	Jakarta	99		APBD	-	99	-
Jakut	2.16.03.1.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jakarta	38	1.023.419.582	APBD	-	38	1.125.761.540
Jakut	2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Presentase Perangkat Daerah pengguna layanan aplikasi, sistem komunikasi intra pemerintah daerah dan pusat data pemerintah daerah/pusat terintegrasi	Jakarta	100		APBD	-	100	-
Jakut	2.16.03.1.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jakarta	1	193.245.814	APBD	-	1	212.570.395
Jakut	2.16.03.1.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jakarta	1	43.323.411	APBD	-	1	47.655.752
Jakut	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Presentase perangkat daerah Provinsi yang telah menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah	Jakarta			APBD	-	0	-

PD/ UKPD	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Keg/ Sub Keg	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target		Keb Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Jakut	2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Pelayanan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Jakarta	3		APBD	-	3	-	
Jakut	2.21.02.1.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Jakarta	12	105.981.638	APBD	-	12	116.579.802	
JSC	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jakarta	4		APBD	-	4	-	
JSC	2.16.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Indeks Kepuasan Layanan BLUD	Jakarta	4		APBD	-	4	-	
JSC	2.16.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jakarta	1	499.565.000	APBD	-	1	549.521.500	
JSC	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Jumlah pemenuhan layanan Teknologi Informatika dan Komunikasi	Jakarta			APBD	-	0	-	
JSC	2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Presentase Perangkat Daerah pengguna layanan aplikasi, sistem komunikasi intra pemerintah daerah dan pusat data pemerintah daerah/pusat terintegrasi	Jakarta	100		APBD	-	100	-	
JSC	2.16.03.1.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City	Jakarta	1	119.503.629.740	APBD	-	1	131.453.992.714	
Kep.1000	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jakarta	4		APBD	-	4	-	
Kep.1000	2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	Jakarta	4		APBD		4	-	
Kep.1000	2.16.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Jakarta	1	1.500.000	APBD		1	1.650.000	

PD/ UKPD	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Keg/ Sub Keg	Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target	Keb Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	SKPD							
Kep.1000	2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	Jakarta	4		APBD	-	4	-
Kep.1000	2.16.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jakarta	1	24.742.645	APBD	-	1	27.216.910
Kep.1000	2.16.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jakarta	1	60.412.327	APBD	-	1	66.453.560
Kep.1000	2.16.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jakarta	1	5.234.760	APBD	-	1	5.758.236
Kep.1000	2.16.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien	Jakarta	3		APBD	-	3	-
Kep.1000	2.16.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jakarta	1	38.453.286	APBD	-	1	42.298.615
Kep.1000	2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jakarta	4		APBD	-	4	-
Kep.1000	2.16.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jakarta	1	13.873.180	APBD	-	1	15.260.498
Kep.1000	2.16.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jakarta	1	32.927.040	APBD	-	1	36.219.744
Kep.1000	2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jakarta	4		APBD	-	4	-
Kep.1000	2.16.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jakarta	1	2.974.800	APBD	-	1	3.272.280
Kep.1000	2.16.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jakarta			APBD	-	0	-

PD/ UKPD	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Keg/ Sub Keg	Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target	Keb Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kep.1000	2.16.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jakarta	1	2.930.400	APBD		1	3.223.440
Kep.1000	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Pemenuhan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	Jakarta			APBD		0	-
Kep.1000	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase informasi yang dikemas dan diproduksi oleh Pemprov DKI Jakarta terhadap isu yang berkembang di media massa dan/atau perlu dilakukan klarifikasi	Jakarta	100		APBD		100	-
Kep.1000	2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jakarta	1	1.142.640.600	APBD		1	1.256.904.660
Kep.1000	2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Jakarta	1	0	APBD		1	-
Kep.1000	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Jumlah pemenuhan layanan Teknologi Informatika dan Komunikasi	Jakarta			APBD		0	-
Kep.1000	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Service Level Agreement Jaringan	Jakarta	99		APBD		99	-
Kep.1000	2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jakarta	51	1.742.360.459	APBD		51	1.916.596.505
Kep.1000	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah pengguna layanan aplikasi, sistem komunikasi intra pemerintah daerah dan pusat data pemerintah daerah/pusat terintegrasi	Jakarta	100		APBD		100	-
Kep.1000	2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan	Jakarta	1	91.200.000	APBD		1	100.320.000

PD/ UKPD	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Keg/ Sub Keg	Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target	Keb Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi							
Kep.1000	2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jakarta	1	0	APBD	-	1	-
Kep.1000	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase perangkat daerah Provinsi yang telah menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah	Jakarta			APBD	-	0	-
Kep.1000	2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Pelayanan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Jakarta	3		APBD	-	3	-
Kep.1000	2.21.02.1.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	Jakarta	1	62.804.313	APBD	-	1	69.084.744
Kep.1000	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jakarta	4		APBD	-	4	-

PENUTUP

Penutup Dokumen Renja



Dokumen Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 2024 merupakan perencanaan kerja untuk periode tahun 2024. Renja merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2023-2026 dengan mempedomani RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024. Fungsi Renja 2024 adalah sebagai pedoman operasional dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebagai upaya mencapai tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2024. Selain itu juga dalam rangka menunjang keberhasilan Kegiatan Strategis Daerah Provinsi DKI Jakarta terutama Pengembangan Smart City dan Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik).

Sebagai pedoman kerja, pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2024 ditetapkan kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta wajib melaksanakan program dan kegiatan dalam Renja Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Anggaran pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2024 akan dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024;
3. Pelaksanaan DPA Tahun 2024 akan dimonitoring setiap bulan dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik setiap 3 bulan. Pada akhir tahun pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2024 akan dievaluasi sebagai bahan penyusunan Renja 2025.
4. Selanjutnya, Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 akan dijabarkan ke dalam Rencana Aksi 2024 dan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2024.

Jakarta, Juli 2023

Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Sigit Wijatmoko
NIP.197408301993111001